

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA**  
**HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF GOOD**  
**GOVERNANCE DI DESA PENATANGAN**  
**KECAMATAN BUNTU MALANGKA'**  
**KABUPATEN MAMASA**  
***ANALYSYS OF THE IMLEMENTATION OF THE FAMILY***  
***HOPE PROGRAM FROM A GOOD GOVERNANCE***  
***PERSPECTIVE IN PENATANGAN VILLAGE,***  
***BUNTU DISTRICT MALANGKA'***  
***MAMASA REGENCY***



**LADI KRISDAYANTI**

**C02 20 401**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2025**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF *GOOD  
GOVERNANCE* DI DESA PENATANGAN  
KECAMATAN BUNTU MALANGKA'  
KABUPATEN MAMASA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI**

**AKUNTANSI**

**LADI KRISDAYANTI**

**C02 20 401**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF *GOOD  
GOVERNANCE* DI DESA PENATANGAN  
KECAMATAN BUNTU MALANGKA'  
KABUPATEN MAMASA**



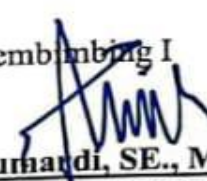
**LADI KRISDAYANTI**

**C02 20 401**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelara Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

  
**Jumaedi, SE., M.Si**  
NIP. 198009192006041022

Pembimbing II

  
**Sufyan Amirullah, SE., M.Ak**  
NIP. 199302222024061002



Menyetujui,

Program Studi Akuntansi

  
**Nuragni M., S.Pd., M.Ak**  
NIP. 198312032019032006

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF *GOOD  
GOVERNANCE* DI DESA PENATANGAN  
KECAMATAN BUNTU MALANGKA'**

**KABUPATEN MAMASA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**LADI KRISDAYANTI**

**C02 20 401**

Telah diuji dan diterima panitia ujian Pada tanggal 01 Oktober 2025 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

**Nama Penguji**

1. Jumardi, SE., M.Si
2. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak
3. Indra Basir, SE., M.Ak
4. Riana Anggraeny Ridwan, SE., M.Si
5. Aswar Rahmat, SE., M.Si

**Jabatan**

- Ketua  
Sekretaris  
Penguji I  
Penguji II  
Penguji III

**Tanda Tangan**

Telah disetujui Oleh

**Pembimbing I**

**Jumardi, SE., M.Si**  
NIP. 19800919 200604 1 022

**Pembimbing II**

**Sufyan Amirullah, SE., M.Ak**  
NIP. 19930222 202406 1 002



Mengesahkan,  
**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB**  
NIP. 19670325 199403 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ladi krisdayanti

Nim : C0220401

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**”Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) Dalam Perpektif  
Good Governance Di Desa Penatangan Kecamatan Buntumalangka  
Kabupaten Mamasa”**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabilah dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majene, 3 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



  
Ladi Krisdayanti

## ABSTRAK

**LADI KRISDAYANTI**, Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam perspektif *Good Governance* (studi kasus Desa Penatangan Kecamatan Buntumalangka' Kabupaten Mamasa, Sulbar). Di bimbing oleh Jumardi, SE., M.Si dan Sufyan Amirullah, SE., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan PKH di Desa Penatangan dilihat dari perspektif *Good Governance*. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Penatangan Kecamatan Buntumalangka' Kabupaten Mamasa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala desa, pendamping PKH, Ketua kelompok PKH, dan masyarakat penerima manfaat dalam pelaksanaan program. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Penatangan telah berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan dan verifikasi rutin, transparansi tercermin dari keterbukaan informasi meskipun masih perlu ditingkatkan, partisipasi masyarakat sangat aktif dalam perencanaan dan evaluasi, efektivitas program berjalan baik meski terkendala ketidaksesuaian data, serta keadilan suda diterapkan namun masih menghadapi tantangan pada ketepatan sasaran. Secara umum, program ini telah mengarah pada tata kelola Pemerintahan yang baik, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam hal transparansi dan pengawasan agar tujuan program lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan, *Good Governance*, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

## **ABSTRACT**

*LADI KRISDAYANTI An Analysis of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) from the Perspective of Good Governance (A Case Study in Penatangan Village, Buntumalangka District, Mamasa Regency, WestSulawesi)  
Supervised by: Jumardi, SE., M.Si and Sufyan Amirullah, SE., M.Ak*

*This study aims to analyze how the PKH is implemented in Penatangan Village from the perspective of Good Governance. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The research location is in Penatangan Village, Buntumalangka District, Mamasa Regency. The informants in this study include the village head, PKH facilitators, PKH group leaders, and beneficiary community members. The data analysis used in this study is validity testing through source triangulation. The results of the study indicate that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Penatangan Village has been carried out well based on the principles of Good Governance.*

**Keywords:** *Family Hope Program (PKH), Good Governance, Transparency, Accountability, Participation.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia termasuk negara berkembang yang masih berjuang melawan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022, sebanyak 26,16 juta orang hidup dalam kemiskinan atau 9,45% dari total penduduk Indonesia. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu strategi yang ditempuh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Pemerintah terus memprioritaskan perubahan pola kemiskinan ini, khususnya di sektor pembangunan Indonesia, karena masih menjadi faktor utama penyebab mayoritas kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan, keterbatasan, kurangnya kapasitas dan banyak cacat menjadi penghambat pembangunan. Di antara tantangan tersebut adalah ketidakmampuan untuk hidup bebas sesuai dengan tingkat kehidupan yang diinginkan, ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan atau perawatan kesehatan yang layak, dan tantangan untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan dan pakaian. Kurangnya keterampilan dan keahlian, pilihan pekerjaan yang tidak memadai, dan kapasitas tenaga kerja dan angkatan kerja yang tidak memadai merupakan penyebab utama keterbatasan populasi dan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus berkembang, khususnya di bidang ekonomi. Namun kemudian krisis keuangan tahun 1997 melanda. Kemiskinan ekstrem melanda Indonesia, yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat, termasuk gizi buruk, keterlambatan sekolah, dan standar

kesehatan yang rendah. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia terus berfokus pada isu kemiskinan. Seperti es, pengangguran dan kemiskinan harus segera diatasi. Orang-orang yang mengikuti isu sosial politik, ekonomi, dan budaya telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang kejadian-kejadian ini, yang saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Mereka menyadari bahwa kejadian-kejadian ini merupakan contoh kerja keras para pengambil keputusan. Peristiwa ini akan mengakibatkan kerugian bangsa dan pemerintah, lama kelamaan masyarakat tidak akan sanggup menghadapi beban yang bertubi-tubi (Wisnu Indrajid, 2014).

Pemerintah, di bawah Presiden Jokowi sendiri, telah mengembangkan sejumlah kebijakan sosial, seperti Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang tinggi. Membantu masyarakat kurang mampu merupakan tujuan dari semua inisiatif ini. dalam upaya membantu mereka menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dimulai dengan bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memerangi kemiskinan di negara ini. Dengan bantuan keuangan langsung untuk mendukung melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kota (Setiawan, 2017). Di bawah Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah Indonesia memperkenalkan bantuan tunai bersyarat (BTB) pada tahun 2007. PKH berbeda dari kelanjutan inisiatif sebelumnya yang mendukung kemampuan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mempertahankan daya beli mereka ketika pemerintah mengubah harga bahan bakar. PKH terutama dimaksudkan sebagai upaya untuk

menciptakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka dan memutus siklus kemiskinan yang telah terjadi. Di Indonesia, PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I, Pro-Poor, yang difokuskan pada penanggulangan kemiskinan. Program ini menawarkan bantuan bersyarat untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. (Anjela, 2019).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan program untuk menanggulangi kemiskinan di negara ini. Program ini merupakan bagian dari program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial berbasis keluarga. Inisiatif ini merupakan kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk menegakkan hak-hak dasar. Banyak unsur dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program yang direncanakan secara terpusat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan program akan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Kebijakan pemerintah terkait PKH juga tidak jauh berbeda. Program ini disebut PKH, dan pelaksanaannya di tingkat daerah tidak menutup kemungkinan akan menemui kendala terkait kebijakan pemerintah, salah satunya terkait penanggulangan kemiskinan.

Salah satu cara untuk berpartisipasi secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan adalah melalui pelibatan masyarakat. Berdasarkan asas tersebut, setiap warga desa yang bersangkutan berhak untuk berpartisipasi secara langsung dalam semua proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang direncanakan oleh

pemerintah setempat. (Sujarweni, 2015). Salah satu cara untuk mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah sebagai proses mengidentifikasi isu dan peluang dalam masyarakat, memilih dan memutuskan solusi potensial untuk mengatasi isu, menerapkan solusi tersebut, dan menilai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Partisipasi menawarkan keuntungan seperti potensi untuk membuat pilihan terbaik dan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan berpikir inovatif masyarakat. Adreeyan (2014).

Pengelolaan keuangan desa yang sesungguhnya merupakan realitas sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, perangkat desa, serta pemerintah pusat dan daerah (Rustiarini, 2016). Maharni (2017) menegaskan bahwa tanpa dukungan dana yang memadai untuk pembangunan dan pelayanan, pemerintah daerah tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, aspek keuangan ini merupakan salah satu faktor mendasar yang digunakan untuk menentukan kapasitas daerah yang sesungguhnya dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Pelaksanaan PKH jangka panjang bertujuan untuk mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin (RSTM) yang selama ini kurang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, memutus siklus kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, sasaran ini juga mendukung inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium

(MDGs). Pengurangan jumlah penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, angka kematian bayi dan balita, serta angka kematian ibu merupakan lima MDGs yang secara tidak langsung akan didukung oleh PKH. Tujuan khusus PKH adalah untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan capaian pendidikan peserta PKH, dan meningkatkan status gizi dan kesehatan umum ibu hamil dan pascapersalinan, balita di bawah lima tahun, anak prasekolah dari keluarga berpenghasilan rendah, dan peserta PKH (Najidah dan Lestari, 2019). Bidang pendidikan dan perawatan kesehatan menjadi fokus utama.

Sebagai provinsi baru hasil pemekaran tahun 2005, PKH di Sulawesi Barat masih perlu penyesuaian untuk mendukung kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga yang memiliki harapan. Pada bulan September 2014, BPS melaporkan bahwa 29.870 orang atau 9,99% dari populasi, tinggal di wilayah perkotaan di Provinsi Sulawesi Barat, sementara 124.820 orang atau 12,67%, tinggal di wilayah pedesaan. Sebanyak 154.690 orang atau 12,05% dari total populasi, hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 246.524 (RP/kapita/bulan) di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan 263 orang Pendamping, Provinsi Sulawesi Barat mendapat kuota penyaluran PKH sebanyak 64.291 KPM pada tahun 2019; kuota ini didistribusikan ke enam kabupaten. Kabupaten Majene memiliki kuota KPM sebanyak 9.404 KPM, Kabupaten Mamasa sebanyak 9.549 KPM, Kabupaten Mamuju sebanyak 7.216 KPM, Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 2.337 KPM, Kabupaten Pasangkayu sebanyak 4.359 KPM, dan Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 31.226 KPM.

Apabila suatu organisasi mampu menghilangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, maka organisasi tersebut dikatakan telah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* (GG). Pada tahun 2018, Rizal Djalil. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia. Dengan adanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penatangan diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintahan, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program akan lebih akuntabel, transparan, efisien, dan tepat sasaran yang nantinya dapat diterima oleh masyarakat.

Salah satu kabupaten yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kabupaten Mamasa. Di antara sekian banyak kabupaten yang tergolong daerah miskin, salah satunya adalah Kabupaten Mamasa yang merupakan kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten yang terletak di ujung paling selatan Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan daerah pegunungan dengan akses terbatas dan jalan yang masih sulit dilalui kendaraan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya akses informasi dan pelaksanaan program pemerintah. Khususnya di Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka, Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mamasa menghadapi kendala umum. Dukungan PKH tidak berjalan dengan baik selama tahap penyaluran di Desa Penatangan, dan waktu penyaluran tidak sesuai dengan jadwal empat kali setahun sebagaimana yang

tercantum dalam buku pedoman PKH tahun 2021. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh masalah administrasi dan birokrasi. Selain itu evaluasi dan pemantauan keberhasilan yang dilakukan pendamping PKH masih sangat kurang sehingga banyak masyarakat yang menyalagunakan dana bantuan PKH tersebut dikarenakan masyarakat masih sangat minim pengetahuan dalam pengelolaan dana PKH sehingga angka kemiskinan sangat sulit berkurang.

Selain itu, persoalan kemiskinan yang masih tinggi juga menuntut adanya tata kelola program bantuan sosial yang benar-benar transparan, akuntabel, serta mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirancang pemerintah pada dasarnya bukan hanya sekadar penyaluran bantuan bersyarat, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong perubahan perilaku sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, efektivitas PKH sangat bergantung pada bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap, mulai dari pendataan penerima manfaat, distribusi bantuan, hingga evaluasi pelaksanaan program.

Di Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka', Kabupaten Mamasa, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius seperti ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya validasi data, hingga keterlambatan penyaluran bantuan. Kondisi ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dana serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program. Dengan demikian, analisis pelaksanaan PKH dalam perspektif *good governance (GG)* menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan

keadilan benar-benar hadir dalam praktik. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola PKH di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif *Good Governance* di Desa Penatangan Kecamatan Buntu Malangka' Kabupaten Mamasa.**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *Good Governance (GG)* di Desa Penatangan Kecamatan Buntu Malangka' Kabupaten Mamasa.

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penatangan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance (GG)*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, serta dapat menjadi sumber informasi bagi akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

### 1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau masukan bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penatangan, Kecamatan Buntu Malangka', Kabupaten Mamasa, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penatangan dalam perspektif Good Governance (GG) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas telah diterapkan dengan baik, dan sudah dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam program ini sudah cukup baik terutama dalam proses penentuan data penerima manfaat. Namun, transparansi informasi mengenai hak dan kewajiban peserta program juga masih kurang, yang berdampak pada munculnya persepsi negatif dan ketidakpuasan di kalangan warga. Di sisi lain, akuntabilitas pelaksana program mulai menunjukkan perbaikan dengan adanya pelaporan dan evaluasi rutin, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan pengaduan publik. Secara umum, Pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penatangan sudah mengarah pada prinsip Good Governance (GG), namun masih diperlukan upaya pembenahan dan peningkatan kapasitas aparatur serta pelibatan aktif masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dan pendamping PKH perlu mengembangkan sistem penyampaian informasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh

masyarakat, seperti papan informasi desa, forum warga, atau pemanfaatan media sosial desa. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman terkait kriteria penerima bantuan dan proses pencairan dana.

2. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk melibatkan masyarakat luas, tidak hanya keluarga penerima manfaat, dalam setiap tahapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Misalnya melalui musyawarah desa khusus untuk program bantuan sosial, guna menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program.
3. Pemerintah Pusat maupun Daerah disarankan untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada para pendamping Sosial PKH, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, komunikatif, dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada di lapangan.
4. Perlu dibentuk atau diperkuat mekanisme pengaduan yang bersifat terbuka dan aman bagi masyarakat, sehingga warga dapat melaporkan ketidakadilan atau kendala yang mereka alami dalam proses pelaksanaan program tanpa takut akan intimidasi atau diskriminasi.
5. Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala oleh pihak yang independen, baik dari akademisi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk menilai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dan memberikan masukan perbaikan secara objektif.
6. Pemerintah Desa dan Dinas Sosial perlu secara berkala melakukan pendataan ulang dan validasi terhadap data keluarga penerima manfaat, agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan evaluasi kinerja karyawan*. Aswaja Presindo.
- Anjela, R. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kuala Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Antor, H. H. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan Di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*. Pontianak: Faculty of Social Science and Political Science
- Arisaputra, M. I (2013). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan reforma agrarian di Indonesia. *Yuridika*, 28(2)
- Agnes Pradinan S, (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulu Kamba Kabupaten Berbes*.
- Adreeyan, R. (2014). Partisipasi masyarakat dan manfaatnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *good governance*
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Bayu M., & Albertus, L., (2016). *Pola Komsumsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gembangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto*. Surabaya: Vol 04 No 1, pp1-8.
- Bismi, K. L., & Ifdal, (2023). Analisis Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Akses Kesehatan Dan Pendidikan Pada Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Niara Vol.15*, 3 Januari 2023, Hal. 468-475
- Cahyani Permata Wunu, dkk. (2020). Dampak Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara.
- Gunawan, I. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. *Retrieved June,7, 2017*.
- Hamzah, Nana B. 2014. "Kinerja Karyawan dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* 10 (2): 123–135.

- Larasati, L., Muda, I., Batu bara, B. M., & Surhayanto, A. (2019). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Perumbuhan Penduduk. *PERSPEKTIF*.
- Lindawati, Sri. Saharuddin. (2015). Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kualitas Kesehatan & Pendidikan Keluarga. *Ekonomi Agrikultural*. Institusi Pertanian Bogor.
- Maryam, Siti dan Hestu Rika Cahyani, “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo.” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, no.1 (2022): 50-72.
- Nabila, Putri Salsa dan Purnama Ramadani Silalahi. “Optimalisasi Good Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Ke Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat).” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, no.1 (2022): 148-156.
- Nur Aziiz, Muhammada, Sawitri Dwi Prastiti. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Aktual*, no 6 (2019): 280-344.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87.
- Natika, D., & Nuraida, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purba, Y. F. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor*, UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN.
- Putri, C. D., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., & Prayudi, M. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa (Studi pada Desa Se-Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Imiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Raudhotul Jannah, (2019). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate, Jakarta Timur*.
- Risaka Nasution. 2023. Analisis Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten

Asahan. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 6 No 1, Januari 2023. E-ISSN: 2599-3410 | P-ISSN: 2614-3259

Rustiarini, N. W. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 230–243.

Rakhmawati, N. 2018. "Efektivitas Program dalam Organisasi." *Jurnal Administrasi Publik* 5(2): 123–130.

Sihura, H. K. (2021). “Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid-19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan).” *Jurnal Inovasi Penelitian*, (4).

Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosial Informa*, 3(3).

Setiawan, I., & Pardiman, P. (2014). Pengaruh Current ratio, Inventory turnover, Time Interest earned dan return on equity terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terftar di BEI periode 2009-2012. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 117-113.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV Alfabeta.

Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Sudi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21-27.

Suryanto, M. H. (2016). *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, Gramedia Widiasarana Indonesia.

*Sosial, Kementerian, (2014). Pedoman Umum PKH.*

Syahputra DKK. 2016, “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”. *Jurnal Volume No. 2 ISSN 2442-4480*. Jawa Barat: Universitas Padjadjaran.

Seran sirilius, (2017). Hubungan antara pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan.

- Shella Yulia Rosalina, (2018). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan* di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik: Teori, praktik, dan kasus*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tri Setiani, (2014). “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”
- Wisnu Indrajid. (2014). *Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan: Gagasan manajemen pengembangan masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan*. Malang: Intrans Publishing.
- Wisnu Indrajid. 2014. “Akuntansi Sektor Publik.” *Jurnal Akuntansi Publik*,
- Yauri, M., & Kelvin, K.L., et al. “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19.” *Media Akuntansi dan Perpanjakan Indonesia*, 2 (2022), 121-150.
- Yesnia, M., & Nur Ida, K.L., et al. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Aset*, 1 (2018), 105-112.